

## B. KINERJA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015

### I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

#### a. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

##### 1.1. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Untuk perhitungan PDRB hingga tahun 2013 BPS menggunakan metode lama dengan tahun dasar 2000 yang terbagi menjadi 9 sektor lapangan usaha. Dengan berkembangnya kondisi ekonomi global, PBB merekomendasikan penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 yang memakai SNA (System National Account) 2008. Menindak-lanjuti permintaan PBB, maka pada tahun 2014 BPS memulai menghitung PDRB menggunakan metode baru dengan tahun dasar 2010. Konsekuensi penghitungan berdasarkan SNA 2008, maka terjadi perubahan metodologi dan cakupan yang semakin luas, yang terbagi menjadi 19 sektor lapangan usaha.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 metode baru dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel**  
**Pertumbuhan PDRB Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	1.382,43	1.540,70	1.689,88
PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	1.192,84	1.262,70	1.331,42
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,08	5,86	5,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung atas dasar harga berlaku, total nilai PDRB Jatim tahun 2013 Rp. 1.382,43 triliun; Rp. 1.540,70 triliun pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 1.689,88 triliun. Sedangkan jika dihitung menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2010, total nilai PDRB Jatim tahun 2013 sebesar Rp. 1.192,84 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 1.262,70 triliun pada tahun 2014 dan Rp. 1.331,42 triliun pada tahun 2015.

Dari angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dihitung berdasar perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Ini menunjukkan karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa sehingga sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Dari metodologi itu, pada tahun 2013 perekonomian Jawa Timur tercatat tumbuh 6,08 persen, berikutnya tahun 2014 menjadi 5,86 persen, dan pada tahun 2015 menjadi 5,44 persen.

Ekonomi Jawa Timur Tahun 2015 bila dibandingkan Tahun 2014 tumbuh sebesar 5,44 persen, sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,86 persen. Perlambatan ini lebih dikarenakan faktor eksternal seperti menguatnya dolar, ketidak stabilan harga minyak mentah dunia, krisis ekonomi Yunani dan naiknya harga pangan dunia. Meskipun demikian capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2015 termasuk cukup tinggi melampaui pertumbuhan Nasional yang hanya mencapai 4,79 persen.

Dari sisi produksi, semua kategori mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami kontraksi sebesar 3,00 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalan sebesar 7,92 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,91 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Net Ekspor Antar Daerah sebesar 13,39 persen. Sedangkan dari sisi

pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,73 persen. Kemudian komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang masing-masing tumbuh sebesar 3,36 persen dan 2,20 persen. Sementara komponen lainnya mengalami kontraksi.

## 1.2. Indeks Gini

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

**Tabel**  
**Gini Rasio Jawa Timur**

Gini Rasio	Tahun		
	2013	2014	2015
Jawa Timur	0,36	0,37	0,41

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ket :  $G < 0,3$  = ketimpangan rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$  = ketimpangan sedang

$G > 0,5$  = ketimpangan tinggi

Indeks Gini Rasio digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Bila mengacu pada nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur 2013-2015 masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3 – 0,5). Selama tahun 2013-2015 nilai gini rasio di Jawa Timur menunjukkan tren kearah peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar 0,37 dan meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2015. Kenaikan tersebut menggambarkan bahwa masih adanya ketimpangan pendapatan masyarakat di Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari distribusi pengeluaran penduduk Jawa Timur. Pengeluaran penduduk kelompok 40 % terendah dan 20 % teratas masih menunjukkan adanya perbedaan.

### 1.3. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Cara lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan masyarakat adalah dengan menggunakan Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia. Bank Dunia mengukur pendistribusian kue ekonomi atau mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan besar persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas.

Kategori ketimpangan menurut Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Pengelompokkannya adalah sebagai berikut :

- a. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- c. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

**Tabel**  
**Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur**

Tahun	40 % bawah	40 % menengah	20 % atas
2013	19,82	34,55	45,63
2014	18,63	35,22	46,15
2015	18,77	36,05	45,18

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Berdasarkan skala kesenjangan yang telah ditetapkan, pada tahun 2015 penduduk yang berpendapatan 40 persen terbawah menikmati hasil kegiatan ekonomi sebesar 18.77 persen, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa Timur masuk kategori rendah.

#### 1.4. PDRB Per Kapita

Salah satu proxy melihat kesejahteraan penduduk adalah PDRB per kapita. Angka ini diperoleh dari angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dibagi dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi angka PDRB per kapita semakin besar kemungkinan kesejahteraan masyarakat suatu daerah semakin baik. Dari hasil perkembangan PDRB per kapita tiga tahun terakhir, menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dari tahun ke tahun cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRBnya setiap tahun meningkat.

**Tabel**  
**PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku**

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	1.382.434,9	1.540.696,5	1.689.882,40
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa)	38.363.195	38.610.202	38.847.561
PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	36.035,45	39.903,87	43.500,35

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Apabila diikuti perkembangannya selama tiga tahun terakhir, PDRB perkapita penduduk Jawa Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PDRB perkapita Jawa Timur mencapai Rp. 36,04 juta, kemudian meningkat menjadi Rp. 39,90 juta pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 PDRB per kapita Jawa Timur meningkat kembali menjadi Rp. 43,50 juta. Ini juga mengartikan bahwa dari total PDRB Jawa Timur, dapat dimaknai setiap penduduk mempunyai kontribusi terhadap geliat ekonomi sebesar Rp. 43,50 juta, suatu angka yang sangat membanggakan.

Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan karena perekonomian Jawa Timur tumbuh cukup baik, bahkan lebih tinggi daripada Nasional. Dengan meningkatnya PDRB per kapita tersebut, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur semakin baik.

### 1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang hakiki tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tetapi secara holistik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dimaksud tidak hanya terfokus pada pembangunan gedung sarana dan prasarana, tetapi berimplikasi pada perubahan kualitas manusia. Bisa dianalogkan, pembangunan yang pro kepada kualitas manusia itu bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam mewujudkan pembangunan yang hakiki, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah telah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas manusia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan upaya serius dengan program peningkatan kualitas manusia baik dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat akan merasa sejahtera, jika pembangunan yang terjadi memberikan implikasi pada tercapainya umur panjang dan sehat, masyarakat semakin berpengetahuan dan dapat hidup layak secara ekonomi. Potret implikasi pembangunan terhadap kualitas manusia dapat dilihat dari hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan ketentuan UNDP (*United Nation Development Programe*), penghitungan IPM untuk seluruh negara menggunakan metode baru. Hal ini dikarenakan IPM metode lama mempunyai kelemahan dan perlu diperbaharui. Pada metode baru ini, angka melek huruf sudah tidak dipakai lagi digantikan angka harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan *geometric mean*. Dampak dari perubahan penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahan angka IPM lebih rendah dibanding metode lama. Tetapi perlu diingat bahwa hasil penghitungan metode baru tidak bisa dibandingkan lagi dengan metode lama, karena sudah berbeda metodologi.

**Tabel**  
**Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015**)
Indeks Pembangunan Manusia	67,55	68,14	68,66

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur  
Ket : \*\*) Angka Sangat Sementara

Selama tiga tahun terakhir, pembangunan manusia di Jawa Timur yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren yang menggembirakan. Kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada tahun 2013 sebesar 67,55 meningkat terus tiap tahun, hingga mencapai 68,14 pada tahun 2014. Pada tahun 2015, angka IPM Jawa Timur meningkat kembali menjadi 68,66 (angka sangat sementara). Meningkatnya IPM ini mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi berimplikasi pada peningkatan kualitas masyarakat di Jawa Timur.

#### 1.6. Persentase Penduduk Miskin

Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan berkorelasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan. Upaya tersebut diantaranya mengurangi penduduk miskin dengan meningkatkan tingkat kesejahteraannya.

**Tabel**  
**Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase Penduduk Miskin	12,73	12,28	12,28

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Angka kemiskinan di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir secara gradual (2013-2015) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2013 angka kemiskinan sebesar 12,73 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.893,01 ribu jiwa, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 12,28 persen atau jumlah penduduk miskin sebesar 4.748,42 ribu jiwa dan tahun 2015 angkanya tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 12,28 persen atau jumlah penduduk miskin sebesar 4.775,97 ribu jiwa.

Turunnya persentase penduduk miskin selama periode tahun 2013-2015, sebagai wujud upaya keras Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Berbagai upaya dan strategi yang dilakukan memberikan kontribusi penurunan kemiskinan dengan tetap meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan.

### 1.7. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

**Tabel**  
**Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiiskinan	87,27	87,72	87,72

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Penurunan dan kenaikan angka kemiskinan memberikan pengaruh pada persentase penduduk diatas garis kemiskinan. persentase penduduk di atas garis kemiskinan selama 3 tahun menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan di tahun 2013 sebesar 87,27 persen, kemudian menjadi 87,72 persen pada tahun 2014 dan tahun 2015 angkanya tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 87,72 persen.



## b. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 1. Pendidikan

#### 1.1. Angka Melek Huruf

Spesifik pada elemen pengetahuan, tingkat melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, melek huruf juga menjadi dasar bagi setiap manusia, agar dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

**Tabel**  
**Angka Melek Huruf Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Angka Melek Huruf	95,17	95,49	96,06

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Perlu diketahui bahwa sasaran pencapaian indikator melek huruf usia 15 tahun ke atas ini menjadi sasaran global dan nasional. Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama kurun waktu 2013-2015 terjadi peningkatan dari 95,17 persen di tahun 2013 menjadi 96,06 persen di tahun 2015. Kenaikannya dari tahun 2013 sampai dengan 2015 sebesar 0,89 persen.

#### 1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Dalam menggambarkan tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya.

Angka rata-rata lama sekolah (*mean years school/MYS*) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia.

**Tabel**  
**Angka Rata-rata Lama Sekolah Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,5	8,6	8,7

*Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur*

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2013-2015 terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk yaitu dari 8,5 pada tahun 2013 menjadi 8,7 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, namun demikian peningkatan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, baik sarana prasarana maupun mutu pendidikan di Jawa Timur.

### 1.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka ini menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga

merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Seperti halnya APK, APM juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Kemdiknas 2010-2014).

**Tabel**  
**Angka Partisipasi Murni Jawa Timur**

Angka Partisipasi Murni	Tahun		
	2013	2014	2015
SD/MI	97,83	98,00	98,35
SMP/MTs	86,36	87,60	87,64
SMA/MA/SMK	59,78	65,78	65,83

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Secara umum dalam tiga tahun terakhir 2013-2015, terjadi peningkatan APM di Jawa Timur untuk semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, angka APM berkisar pada angka 97,83 hingga 98,35 persen. Sementara APM SLTP Jawa Timur 2013-2015 terus mengalami peningkatan mulai 86,36 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 87,64 persen ditahun 2015. Sementara APM SLTA, mulai tahun 2013 terus meningkat mulai dari 59,78 persen hingga pada tahun 2015 sebesar 65,83 persen.

#### 1.4. Angka Partisipasi Kasar

Salah satu indikator kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar/APK (lihat Renstra Depdiknas 2006-2010). Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, serta tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Kondisi ini dapat tercermin dari APK untuk setiap jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada suatu tingkat pendidikan (SD/SLTP/SLTA sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 tahun untuk SD sederajat, 13-15 tahun untuk SLTP sederajat dan 16-18 tahun untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang penting sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

**Tabel**  
**Angka Partisipasi Kasar Jawa Timur**

Angka Partisipasi Kasar	Tahun		
	2013	2014	2015
SD/MI	112,70	112,72	112,79
SMP/MTs	102,22	102,85	102,90
SMA/MA/SMK	78,21	78,23	79,14

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

## 2. Kesehatan

### 2.1. Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur  $x$  adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $x$ , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi

mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS RI dengan metode tidak langsung, rata-rata AHH di Jawa Timur selama 3 tahun terakhir (2013-2015) menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari 70,34 (2013) menjadi 70,61 (2015).

**Tabel**  
**Angka Harapan Hidup Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup	70,34	70,45	70,61

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

## 2.2. AKB (/1.000 Kelahiran Hidup)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

**Tabel**  
**Angka Kematian Bayi di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Angka Kematian Bayi	27,23	26,66	25,82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan angka kematian bayi selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2013 angkanya mencapai 27,23, selanjutnya terus menurun hingga tahun 2015 menjadi 25,82 Per 1000 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi. Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi.

### 2.3. AKI (1/100.000 Kelahiran Hidup)

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena kecelakaan per 100.000 kelahiran hidup.

**Tabel**  
**Angka Kematian Ibu di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Angka Kematian Ibu	97,39	93,52	89,60

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Informasi mengenai tingginya angka kematian ibu akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat

kesehatan reproduksi. Secara umum angka kematian ibu (AKI) di Jawa Timur selama tahun 2013-2015 terus menunjukkan penurunan, yaitu masing-masing 97,39 (tahun 2013), 93,52 (tahun 2014), dan 89,60 (tahun 2015) per 100.000 kelahiran hidup.

#### 2.4. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah balita. Kondisi ini dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- rendah = jika gizi kurang di bawah 10 %
- sedang = jika gizi kurang 10-19 %
- tinggi = jika gizi kurang 20-29 %
- sangat tinggi = jika gizi kurang 30 % atau lebih

**Tabel**  
**Persentase Balita Gizi Buruk di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase Balita Gizi Buruk	2,2	2,0	2,2

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Jumlah balita status gizi buruk di Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 2,2 persen, kemudian menurun menjadi 2,0 persen pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 2,2 persen artinya diantara 100 balita 2 diantaranya mengalami gizi buruk.

## 2.5. Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan (%)

Penanggulangan kasus balita gizi buruk dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu bagi balita gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda komplikasi medis dilakukan penanganan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Theurapeutic Feeding Centre (TFC) maupun Rumah Sakit. Sedangkan bagi balita gizi buruk tanpa komplikasi dilakukan melalui rawat jalan dengan pembinaan oleh petugas kesehatan dan kader Posyandu. Perkembangan Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan dalam tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan, yaitu 100 %. Hal ini menggambarkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan gizi buruk.

**Tabel**  
**Cakupan Balita Gizi Buruk Yang mendapat Perawatan di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Cakupan Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

## 3. Ketenagakerjaan

### 3.1. Rasio Penduduk Yang Berkerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah  $= (100 - \text{angka pengangguran})$ .

**Tabel**  
**Rasio Penduduk Yang Berkerja di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Rasio Penduduk Yang Berkerja	95,67	95,81	95,53

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



Rasio penduduk yang bekerja di Jatim selama tiga tahun terakhir (2013-2015) mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2013 Rasio penduduk yang bekerja mencapai 95,67 persen, kemudian mengalami kenaikan tahun 2014 menjadi 95,81 persen dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin menjadi 95,53 persen.

## **II. ASPEK PELAYANAN UMUM**

### **a. Fokus Layanan Urusan Wajib**

#### **1. Pendidikan**

##### **1.1. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di bidang pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Perkembangan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar untuk SD/MI pada periode tahun 2013-2015 terus mengalami kenaikan tiap tahunnya yaitu dari 99,92 persen pada tahun 2013 menjadi 99,94 persen tahun 2015, demikian juga untuk jenjang SMP/MTs dari 98,29 persen pada tahun 2013 menjadi 98,99 persen tahun 2015 dan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dari 69,95 pada tahun 2013 menjadi 72,14 tahun 2015. Dengan semakin meningkatnya APS pendidikan dasar maka program wajar 9 tahun akan segera tercapai, sedangkan meningkatnya APS pendidikan menengah ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

**Tabel**  
**Angka Partisipasi Sekolah Jawa Timur**

Angka Partisipasi Sekolah	Tahun		
	2013	2014	2015
SD/MI	99,92	99,93	99,94
SMP/MTs	98,29	98,39	98,99
SMA/MA/SMK (16-18 Tahun)	69,95	71,23	72,14

*Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur*

## 2. Pekerjaan Umum

### 2.1. Jalan dan Jembatan

#### a) Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap (Km)

Kriterianya adalah jalan provinsi memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI minimum nilainya sedang. Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

**Tabel**  
**Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap (Km)**

JALAN PROVINSI	Tahun		
	2013	2014	2015
Mantap:	1556,62	1543,93	1574,82
a. Baik	717,55	1.185,38	727,14
b. Sedang	839,07	358,55	847,68
Tidak Mantap	204,29	1778,31	186,09
a. Rusak Ringan	181,79	199,59	135,99
b. Rusak Berat	22,50	17,40	50,10
TOTAL	1.760,91	1.760,91	1.760,91

*Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur*

### b) Panjang Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik (M)

Kriterianya jembatan Provinsi, kondisinya terbagi menjadi 3 yaitu kondisi baik; rusak; dan rusak berat. Panjang jembatan di Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai 14.952,90 m dan menurun pada tahun 2015 menjadi 13.708,28 m. Sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2015 mencapai 13.708,28. Dengan meningkatnya kondisi jembatan dalam kondisi baik, tentunya akan meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di Jawa Timur.

**Tabel**  
**Panjang Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap (M)**

JEMBATAN PROVINSI	Tahun		
	2013	2014	2015
Kondisi:			
a. Baik (M)	13.965,98	13.747,08	13.708,28
b. Rusak (M)	945,92	894,74	894,74
c. Rusak Berat (M)	41,00	41,00	79,80
TOTAL	14.952,90	14.682,82	14.682,82

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

### c) Panjang Jalan Yang Terbangun (Km)

Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur merencanakan pembangunan jalan baru sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat Jawa Timur. Rencana pembangunan tersebut meliputi :

- Jalan Tembus Lawang Batu sepanjang 33,907 Km
- Jalan Akses PIMPA sepanjang 3,300 Km
- Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun sepanjang 64,00 Km

**Tabel**  
**Panjang Jalan Yang Terbangun (Km)**

JALAN	Tahun		
	2013	2014	2015
Panjang Jalan Terbangun (Km)	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Sampai dengan tahun 2015 rencana pembangunan jalan tersebut masih dalam tahap pra konstruksi, yaitu

- Jalan Tembus Lawang Batu sampai saat ini pada tahap penyusunan Fs dan AMDAL.
- Jalan Akses PIMPA sampai saat ini pada tahap pembuatan dokumen UKL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL ( Upaya Pemantauan Lingkungan).
- Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun sampai saat ini masih pada tahapan Kajian.

**d) Panjang jembatan yang terbangun (M)**

Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur merencanakan pembangunan jembatan baru sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat Jawa Timur. Rencana pembangunan tersebut meliputi :

- Jembatan Tembus Lawang Batu sepanjang 385,00 Meter
- Jembatan pada Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun sepanjang 45,00 Meter

Sampai dengan tahun 2015 rencana pembangunan jalan tersebut masih dalam tahap pra konstruksi, yaitu

- Jalan Tembus Lawang Batu sampai saat ini pada tahap penyusunan penyusunan Fs dan AMDAL.
- Jalan Akses PIMPA sampai saat ini pada tahap dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL ( Upaya Pemantauan Lingkungan).
- Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun sampai saat ini masih pada tahapan Kajian.

**Tabel**  
**Panjang Jembatan Yang Terbangun (M)**

JALAN	Tahun		
	2013	2014	2015
Panjang Jembatan Terbangun (Km)	0	0	0
TOTAL	0	0	0

*Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur*

**e) Panjang Jalan Lintas Selatan Yang Terbangun (Km)**

Panjang Jalan Lintas Selatan (JLS) yang direncanakan 673,872 Km, saat ini sudah terbangun jalan baru sepanjang 109,565 Km, jalan lama eksisting sepanjang 253,455 Km dengan total panjang yang sudah terbangun 363,020 Km. Sedangkan yang belum terbangun 310,852 Km. Status pembebasan tanah sampai dengan tahun 2015 yaitu sudah terealisasi seluas 418,82 Km, sedangkan yang belum dibebaskan seluas 255,049 Km.

**Tabel**  
**Panjang Jalan JLS Yang Terbangun (Km)**

JALAN JLS	Tahun		
	2013	2014	2015
Jalan (Aspal + Rigid)	330,995	330,995	363,020
TOTAL	330,995	330,995	363,020

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

**f) Panjang Jembatan JLS Yang Terbangun (M)**

Panjang jembatan JLS yang terbangun pada tahun 2013 mencapai 2.378 m dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 4.373 m. Permasalahan yang terjadi pada Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan Provinsi Jawa Timur yaitu :

- Terjadi kelangkaan bahan baku material pasir mulai tanggal 29 September 2015 s/d 8 Desember 2015 (70 hari kalender).
- Paket terdampak pada Paket Jalan Kalimujur – Bts. Jember Kab. Lumajang dan Paket Jalan Glenmore – Kendenglembu Kab. Banyuwangi.

**Tabel**  
**Panjang Jembatan JLS Yang Terbangun (M)**

JEMBATAN JLS	Tahun		
	2013	2014	2015
Jembatan (Bangunan Atas + Bawah)	2.378	4.113	4.373
TOTAL	2.378	4.113	4.373

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

## 2.2. Luas Layanan Irigasi (Ha)

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat di tingkat Provinsi diutamakan guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

**Tabel**  
**Luas Layanan Irigasi di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Luas Layanan Irigasi (Ha)	2.055.362	2.055.362	2.055.362

Sumber : Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

## 2.3. Rasio Kondisi Fisik saluran irigasi

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Kinerja jaringan irigasi adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.

**Tabel**  
**Rasio Kondisi Fisik Saluran Irigasi di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Rasio Kondisi Fisik Saluran Irigasi (%)	67,88	68,07	68,35

Sumber : Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

#### 2.4. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih

Air merupakan salah satu dari kebutuhan dasar makhluk hidup. Air yang dikonsumsi tentunya harus memenuhi standar kesehatan seperti tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau. Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat urgent karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Air Minum di Perkotaan dan di Perdesaan ini didukung oleh kegiatan antara lain :

- Penyediaan dan Pengelolaan sarana dan prasarana air minum di perdesaan dan daerah rawan air;
- Fasilitasi sistem penyediaan air minum (SPAM) regional;
- Peningkatan daya dukung lingkungan sebagai pelestarian/peningkatan kawasan tangkap sumber air baku,

**Tabel**  
**Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih di Jawa Timur**

Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	Tahun (%)		
	2013	2014	2015
Perkotaan	61,89	66,76	73,03
Perdesaan	56,98	57,97	69,45

Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Tingkat pelayanan air minum pada tahun 2015 terjadi peningkatan baik di perkotaan maupun di perdesaan, di perkotaan meningkat sebesar 6,27 % dibanding tahun 2014, Tetapi bila ditinjau dari jumlah penduduk perkotaan pada tahun 2015 terjadi penurunan persentase pelayanan, Hal ini disebabkan karena selama kurun waktu 2014–2015 telah terjadi kenaikan jumlah penduduk perkotaan, dimana peningkatan penyediaan sarana air bersih belum sebanding dengan

pertambahan penduduk perkotaan di Jawa Timur. Sedangkan di pedesaan capaian pada tahun 2015 terjadi peningkatan 11,48% dibanding tahun 2014, sedangkan capaian SDGs Tingkat Nasional sebesar 70,30%.

## 2.5. Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah

Pola hidup bersih bertujuan untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan limbah berbahaya lainnya. Pola hidup bersih merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kesehatan. Karena itu keberadaan sanitasi menjadi sangat penting didalam setiap rumah tangga. Salah satu tujuan pengelolaan dan pengolahan air limbah adalah menekan berkembangnya penyakit yang ditularkan dan menyebar melalui air permukaan (sungai, waduk) dan air tanah (sumur gali/pompa). Semakin terkontaminasi air di suatu daerah, maka semakin besar kemungkinan terjangkitnya penyakit melalui air.

**Tabel**  
**Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah di Jawa Timur**

Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah	Tahun (%)		
	2013	2014	2015
Perkotaan	74,66	78,09	78,10
Pedesaan	44,22	46,59	48,66

*Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur*

Prioritas pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang salah satu indikatornya direpresentasikan dengan tingkat pelayanan sanitasi di perkotaan dan pedesaan yang membandingkan antara jumlah KK yang membutuhkan pasarana sanitasi di perkotaan dan di pedesaan. Pencapaian indikator tersebut senantiasa menunjukkan peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 2013 s/d 2015. Tingkat pelayanan air limbah pada tahun 2015 terjadi peningkatan baik di perkotaan maupun di pedesaan, di perkotaan meningkat sebesar 0,01 % dibanding tahun 2014, sedangkan di pedesaan capaian pada tahun 2015 terjadi peningkatan 2,07% dibanding tahun 2014 sedangkan capaian SDGs Tingkat Nasional sebesar 61,06%.



## 2.6. Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya).

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.

Kegunaan dengan adanya saluran drainase:

- Mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah.
- Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.
- Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan.
- Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

**Tabel**  
**Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan	79,87	79,96	80,07

Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Cakupan pelayanan drainase di perkotaan tahun 2013 sebesar 79,87%, tahun 2014 sebesar 79,96%, dan tahun 2015 sebesar 80,07% ada peningkatan sebesar 0,11% sedangkan capaian SDG's 2015 tingkat nasional pada tahun 2015 sebesar 57,75%.

## 2.7. Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan masalah yang hampir dijumpai pada setiap wilayah di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Sampah telah menjadi masalah, terutama pada daerah perkotaan. Pertumbuhan penduduk, berkembangnya perekonomian, urbanisasi, dan naiknya standar hidup merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah sampah dan tingkat kompleksitas masalah pengelolaan sampah.

Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut, memberikan dampak sangat besar bagi manusia dan lingkungan. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai, pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Selain itu bau yang tidak sedap akan memberikan efek buruk bagi daerah di sekitarnya.

Pengelolaan sampah meliputi proses pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Sampah yang sudah dikumpulkan, diangkut ketempat penampungan sampah sementara (TPS). Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh dinas kebersihan dengan sistem pembagian lokasi, setiap truk pengangkut sampah mempunyai tugas di wilayah tertentu.

**Tabel**  
**Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan	82,78	82,96	84,14

Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Cakupan capaian layanan persampahan di perkotaan tahun 2013 sebesar 82,78% dan pada tahun 2014 sebesar 82,96%, pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan drainase di wilayah perkotaan meningkat menjadi 84,14% ada peningkatan sebesar 1,42%, sedangkan capaian SDG's 2015 tingkat nasional pada tahun 2015 sekitar 86,73%.

### 3. Perumahan

#### 3.1. Persentase Rusun Terbangun

Tujuan Khusus Pembangunan Rumah Susun adalah untuk mengendalikan lajunya pembangunan rumah-rumah biasa yang banyak memakan lahan. Menurut UU No. 16 tahun 1985 Tentang Rumah Susun, tujuan Pembangunan Rumah Susun (Rusun) adalah:

- Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya.
- Meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah didaerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang.
- Dengan semakin mahalnya harga tanah untuk pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST), maka pemerintah membangun hunian secara vertikal yaitu pembangunan Rusunawa, dan target pembangunan Rusunawa sampai dengan tahun 2025 di Jawa Timur sebesar 100%.

**Tabel**  
**Jumlah Rusun Terbangun di Jawa Timur**

Indikator	Tahun (%)		
	2013	2014	2015
Persentase Rusun Terbangun	16,06%	23,78%	26,33%

Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Pembangunan Rusunawa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama 7 (tujuh) tahun terakhir mulai tahun 2009 s/d tahun 2015, sejumlah 122 TB atau sebanyak 17.392 Unit Hunian. Sedangkan Pencapaian Persentase Pembangunan Rusunawa di Jawa Timur sampai dengan tahun 2015 sebesar 26,33%.

#### 4. Perhubungan

##### 4.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan LLAJ Prov. Jatim

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sector transportasi oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.

**Tabel**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan**  
**Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov Jatim**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov Jatim	82,06	85,88	74,41

*Sumber : Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur*

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2014 menggunakan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NOMOR 38 TAHUN 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik yang didalamnya terdapat 14 (Empat belas) unsur variable sebagai dasar penilaian yaitu Prosedur pelayanan (U1), Persyaratan pelayanan (U2), Kejelasan petugas pelayanan (U3), Kedisiplinan petugas pelayanan (U4), Tanggung jawab petugas pelayanan (U5), Kemampuan petugas pelayanan (U6), Kecepatan pelayanan (U7), Keadilan mendapatkan pelayanan (U8), Kesopanan dan keramahan petugas (U9), Kewajaran biaya pelayanan (U10), Kepastian biaya pelayanan (U11), Kepastian jadwal pelayanan (U12), Kenyamanan lingkungan (U13), Keamanan pelayanan (U14), Sedangkan pada pengukuran IKM di tahun 2015 terjadi perubahan dasar variable dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

dengan 9 (sembilan) unsur variabel penilaian terdiri dari Persyaratan pelayanan (U1), Prosedur pelayanan (U2), Waktu pelayanan (U3), Biaya/Tarif pelayanan (U4), Produk Spesifikasi Jenis pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Maklumat Pelayanan (U8), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9), dimana pada tahun 2015 maklumat pelayanan terkait layanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang belum dipublikasikan, sehingga berpengaruh terhadap variabel penilaian Indeks Kepuasan masyarakat. Maklumat pelayanan dimaksud merupakan bentuk komitmen yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, pengaduan dan melakukan pengawasan.

#### **4.2. Prosentase Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota**

Penghargaan WTN adalah penghargaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota sebagai perwujudan pembinaan pemerintah dalam menata transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan berkelanjutan. Jawa Timur merupakan Provinsi pertama di Indonesia yang menerima Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana, penghargaan ini diberikan kepada provinsi yang telah lima kali berturut – turut memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama,

Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya. Disamping kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan.

**Tabel**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov Jatim**

NO	JENIS PENGHARGAAN	SATUAN	TAHUN		
			2013	2014	2015
1	Plakat Wahana Tata Nugraha	Kab/kota	5	1	8
2	Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas	Kab/kota	11	21	18
3	Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Angkutan	Kab/kota	-	2	-
4	Piala Wahana Tata Nugraha	Kab/kota	5	-	1
5	Piala Wahana Tata Nugraha Wira Karya	Kab/kota	-	-	-
<b>JUMLAH KAB/KOTA BERPREDIKAT WTN</b>		<b>Kab/kota</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>27</b>
<b>JUMLAH KAB/KOTA DI JAWA TIMUR</b>		<b>Kab/kota</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>% KAB/KOTA BERPREDIKAT WTN DI JAWA TIMUR</b>		<b>Kab/kota</b>	<b>55%</b>	<b>63%</b>	<b>71%</b>

Sumber : Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur

Dibandingkan tahun 2014, kabupaten/kota di Jawa Timur yang menerima penghargaan WTN kali ini mengalami peningkatan jumlah. Jika tahun 2014 berjumlah 24 kabupaten/kota, Pada tahun 2015 mengalami peningkatan yakni sebanyak 27 Kabupaten/Kota dengan rincian Kota Penerima Plakat WTN Tahun 2015 Kab. Sidoarjo (kategori sedang), Kab. Pasuruan (kategori sedang), Kab. Bojonegoro (kategori kecil), Kab. Lamongan (kategori kecil) , Kab. Gresik(kategori kecil), Kab. Ngawi(kategori kecil), Kab. Mojokerto(kategori kecil) dan Kab. Nganjuk(kategori kecil). Selain itu, ada beberapa Kab/Kota penerima Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Tahun 2015 yakni Kota Surabaya(kota meteropolitan), Kota Malang (besar), Kota Mojokerto (sedang), Kab. Malang (sedang), Kota Blitar (sedang), Kota Pasuruan (sedang), Kab. Jember (sedang), Kota Kediri (sedang), Kab. Jombang (sedang), Kab. Banyuwangi (sedang) , Kab. Tulungagung (kecil), Kab. Tuban (kecil), Kab Lumajang (kecil), Kab. Magetan (kecil), Kab Trenggalek (kecil), Kab. Pacitan (kecil), Kab. Blitar (kecil), dan Kab Situbondo (kecil). Sedangkan Kota Penerima Piala WTN Tahun 2015 diraih Kota Probolinggo(sedang)

#### 4.3. Jumlah Alarm Early Warning System terpasang

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) di perlintasan rel Kereta Api (KA) yang tidak berpaling pintu. Sistem ini diyakini bisa menjadi solusi untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang rel kereta api.

**Tabel**  
**Perkembangan Alarm Early Warning System Terpasang (Titik)**

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Daop 7 Madiun	62	73	92
Daop 8 Surabaya	41	55	68
Daop 9 Jember	42	60	76
<b>Total</b>	<b>145</b>	<b>188</b>	<b>236</b>

Sumber : Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur

Perkembangan *alarm early warning system* (AEWS) terpasang di perlintasan rel kereta api Jawa Timur selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 145 titik (2013); 188 titik (2014); dan 236 titik (2015). Sedangkan untuk jumlah pemasangan AEWS tertinggi ada di Daop 7 Madiun dan terendah di Daop 8 Surabaya.

## 5. Penataan Ruang

### 5.1. Rasio Jumlah RTR Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dari tahun 2013 hingga tahun 2015, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) yang telah disusun adalah 21 RTR KSP.

**Tabel**  
**Rasio Jumlah RTR Kawasan Strategis Provinsi**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Rasio jumlah RTR Kawasan Strategis Provinsi (%)	30,77	43,58	53,85

Sumber : PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2013, telah tersusun 12 RTR KSP dari 39 RTR KSP di Jawa Timur yang harus disusun dengan persentase 30,77%. Pada tahun 2014, telah tersusun 17 RTR KSP, bertambah 5 KSP sehingga persentase menjadi 43,58%. Dan tahun 2015 telah tersusun 21 RTR KSP bertambah 4 KSP sehingga persentase menjadi 53,85%.

## 5.2. Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota

Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota merupakan tindak lanjut dari RTRW kabupaten/kota sebagai alat kendali dan operasionalisasi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari tahun 2013 hingga tahun 2015, terdapat 24 Raperda Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang telah mendapat Persetujuan Substansi Gubernur.

**Tabel**  
**Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten/kota**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	2	6	16

Sumber : PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Setiap tahun, target Persetujuan Substansi Raperda RRTR Kabupaten/Kota adalah 7 RRTR. Pada Tahun 2013, terdapat 2 RRTR yang telah mendapat Persetujuan Substansi. Tahun 2014 meningkat menjadi 6 RRTR, dan tahun 2015 jumlah RRTR yang telah mendapat Persetujuan Substansi Gubernur meningkat lagi menjadi 16 RRTR Kabupaten/Kota. Total dari tahun 2013-2015 terdapat 24 Persub Ranperda RDTR.



### 5.3. Prosentase Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Tata Ruang

Petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan perencanaan tata ruangnya.

**Tabel**  
**Prosentase Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Tata Ruang**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Prosentase Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Tata Ruang (%)	5	10	10

Sumber : PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2013 capaian prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang mencapai 5%. Tahun 2014 capaian prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang mencapai 10%. Dan pada tahun 2015 telah diselesaikan 2 Rapergub NSPK pemanfaatan ruang. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 Dinas PU Cipta Karya lebih fokus dalam proses penerbitan Persetujuan Substansi RTR Kawasan Strategis Provinsi sehingga capaian prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang tahun 2015 hanya mencapai 10%.

### 5.4. Presentase Kasus Mediasi Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang perlu dilakukan mediasi agar terwujud pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruangnya.

**Tabel**  
**Prosentase Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Tata Ruang**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Presentase Kasus Mediasi Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang (%)	75	100	100

Sumber : PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Tahun 2013 terdapat 1 kasus pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yaitu Kegiatan Pembangunan Hotel di sekitar Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Kasus tersebut telah dilakukan mediasi serta dapat terselesaikan. Dan terdapat 1 kasus lagi di tahun 2013 yaitu Kegiatan Pembangunan Pabrik Baja di sekitar situs candi di Trowulan Kab. Mojokerto. Kasus ini sudah dilakukan mediasi namun belum terselesaikan sepenuhnya. Kasus ini selanjutnya dilanjutkan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 terdapat masing-masing 2 kasus pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yaitu Kegiatan Pembangunan Pabrik Baja di sekitar situs candi di Trowulan Kab. Mojokerto dan Kegiatan Pembangunan Pergudangan dan Toko Sempadan Sungai Brantas di Wringin Anom Kab. Gresik pada tahun 2014, sedangkan tahun 2015 adalah Kegiatan Pembangunan Ruko di sekitar Jembatan Suramadu sisi Surabaya dan Kegiatan Pembangunan Gudang dan Workshop Kerajinan Kayu di Kabupaten Probolinggo. Masing-masing kasus tersebut telah dilakukan mediasi dan dapat terselesaikan.

## **6. Lingkungan Hidup**

### **6.1. Penurunan beban pencemaran (BOD dan COD)**

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Sesuai perkembangan ekonomi dan pertumbuhan industri di DAS Brantas, pada saat ini potensi industri terdapat+ 1.004 buah dengan jumlah industri potensi pencemar + 483 buah, dikali Surabaya 65 industri dan DAS Brantas 33 industri. Umumnya

sumber pencemar berasal dari limbah domestik sebesar 50%, limbah industri sebesar 40 %, limbah pertanian dan sebagainya sebesar 10%.

Selama periode 2014-2015, menunjukkan perbaikan dengan indikator penurunan konsentrasi BOD dari 4,27 mg/l menjadi 4,14 mg/l dan COD dari 12,45 mg/l menjadi 11,88 mg/l. Dengan demikian pada tahun 2015 terdapat kenaikan kualitas air.

**Tabel**  
**Penurunan beban pencemaran (BOD dan COD) di Jawa Timur**

Parameter (mg/l)	Tahun		
	2013	2014	2015
BOD (Biological Oxygen Demand)	3,60	4,27	4,14
COD (Chemichal Oxygen Demand)	10,92	12,45	11,88

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur

## 6.2. Cakupan penghijauan (konservasi) sumber mata air (titik)

Mata air menjadi sumber utama masyarakat mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari hari seperti minum, mandi, mencuci dan juga irigasi. Namun akhir akhir ini banyak daerah di Indonesia mengalami kekeringan pada musim kemarau karena sumber air yang mengering.

Berkurangnya daerah serapan air karena pembangunan dan juga kerusakan vegetasi di daerah tangkapan air menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya sumber air. Selain itu peningkatan jumlah penduduk meningkatkan konsumsi air bersih. Melihat permasalahan tersebut diperlukan adanya pemeliharaan terhadap sumber air untuk menjamin ketersediaannya bagi berbagai macam kebutuhan manusia.

**Tabel**  
**Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Cakupan penghijauan (konservasi) sumber mata air (titik)	4	4	5

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur

Untuk merehabilitasi lingkungan yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, selain tetap berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan konservasi terhadap mata air yang mengalami penurunan debit air atau mata air yang sudah mati. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Demplot Pelestarian Sumber Mata Air dengan Vegetasi. Pada tahun 2015 ditargetkan ada 5 (lima) daerah yang terkonservasi dan terealisasi sebanyak 5 lokasi, yaitu:

- Desa Karangsono, Kec. Pagelaran, Kab Malang
- Dusun Pager Gunung, Ds. Gerbo, Kec. Purwodadi, Kab Pasuruan
- Desa Jarak, Kec. Wonosalam, Kab Jombang
- Desa Medowo, Kec. Kandangan, Kab Kediri
- Ds. Krisik, Kec. Gandungsari, Kab Blitar

Selama periode 2013 – 2015, secara bertahap melakukan peningkatan jumlah lokasi kegiatan demplot dalam rangka perlindungan sumber mata air, terutama di sepanjang wilayah DAS Brantas. Hal ini didasarkan pada semakin kritisnya sumber mata air di wilayah tersebut.

### **6.3. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (Kewenangan Prov)**

Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipengaruhi oleh banyaknya industri dan maraknya bisnis properti dan atau kegiatan usaha lainnya. Namun pertumbuhan industri ini tidak dibarengi dengan pemeliharaan kualitas lingkungan yang baik di Jawa Timur. Hal ini akan memberikan dampak pencemaran pada kualitas lingkungan.

Kerusakan lingkungan hidup pada akhirnya akan membawa kerugian sosial ekonomi yang sangat besar bagi penduduk yang bermukim di wilayah itu khususnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, pembangunan ekonomi seharusnya mutlak diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan.

**Tabel**  
**Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (kewenangan Prov) (%)	80	73	69.56

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan maka dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup oleh para pelaku usaha. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan dokumen izin lingkungan/AMDAL. Pada tahun 2015 target jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang diawasi sebanyak 255 dan dapat terealisasi 345 perusahaan atau capaian sebesar 135 %. Dari hasil pengawasan yang dilakukan diperoleh hasil sebanyak 240 perusahaan yang tergolong taat dan 105 perusahaan belum taat atau sebesar 69,56% cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Selama tahun 2014 hingga 2015 terus dilakukan peningkatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh industri dan/atau kegiatan. Tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan ketaatan industri terhadap pelaksanaan dokumen amdal.

#### **6.4. Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup Dengan sanksi administrasi**

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak dan berperan dalam mengajukan pengaduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pada tahun prosentase tidak lanjut pengaduan masyarakat yang masuk akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diterima sebesar 80 pengaduan dan sudah ditindaklanjuti secara keseluruhan atau sudah 100(%). Dari hasil rekomendasi penyelesaian kasus pengaduan, ada 1 kasus pencemaran yang kurang mendapat respon pelaku usaha sehingga dilakukan setelah dilakukan koordinasi antar instansi terkait di buat sanksi administrasi. Sehingga

terkait persentase penyelesaian kasus LH dengan sanksi administrasi sebanyak 100%. Penerapan sanksi ini diharapkan meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

**Tabel**  
**Persentase penyelesaian kasus LH dg sanksi administrasi di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase penyelesaian kasus LH dg sanksi administrasi (%)	66.67	100	100

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur

## 7. Ketenagakerjaan

### 7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya.

Berdasarkan data BPS Agustus 2015 (hasil Sakernas 2015), jumlah Penduduk Usia Kerja (penduduk 15 tahun ke atas) sebanyak 29,880 juta orang. Dari jumlah Penduduk Usia Kerja tersebut, angkatan kerjanya sebesar 67,84 persen. TPAK sebesar 67,84 persen artinya dari 100 orang penduduk usia kerja, 67-68 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Angka TPAK di Jawa Timur sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 menunjukkan kecenderungan menurun, dari 69,78 tahun 2013 menjadi 67,84 tahun 2015.

**Tabel**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tahun		
	2013	2014	2015
Pedesaan	73,79	70,20	69,27
Perkotaan	65,39	65,85	66,56
Pedesaan + Perkotaan	69,78	68,12	67,84

Sumber : Sakernas 2013 – 2015, BPS Jawa Timur

Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPAK di pedesaan lebih besar dibandingkan TPAK di daerah perkotaan. Hal ini diduga karena ada daerah pedesaan, anggota rumah tangga berperan sebagai pekerja keluarga baik dibayar maupun tidak dibayar, khususnya pada sektor informal.

## 7.2. Indeks Pembangunan Gender

Salah satu indikator pemerintahan yang responsif gender dapat dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhatikan ketimpangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

**Tabel**  
**Indeks Pembangunan Gender di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015**)
Indeks Pembangunan Gender	90,22	90,83	91,29

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur  
Ket : \*\*) Angka Sangat Sementara

Indeks pembangunan gender (IPG) dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IPG selama kurun waktu tahun 2013-2015, berturut-turut mencapai 90,22 (2013); 90,83 (2014), dan 91,29 (2015).

Peningkatan IPG setiap tahunnya menunjukkan bahwa program-program Pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan Indonesia. Hal ini terlihat dari pencapaian IPG pada kurun waktu tersebut telah mampu mengurangi jarak (gap) secara nyata

dalam pencapaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, perlu dilakukan upaya yang maksimal sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata.

### 7.3. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari Indeks Pemberdayaan Gender mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

**Tabel**  
**Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015**)
Indeks Pemberdayaan Gender	70,77	68,17	69,17

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

*Ket : \*\*) Angka Estimasi Sementara BPPKB Prov. Jatim*

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2013 sebesar 70,77, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 68,17 dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 69,17. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender.

## 8. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

### 8.1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar



atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan ekonomi karena kegiatan usaha koperasi lebih banyak berhubungan langsung dengan ekonomi kerakyatan.

**Tabel**  
**Persentase Koperasi Aktif di Jawa Timur**

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Jumlah Koperasi	30.741	30.866	31.171
Jumlah Koperasi Aktif	27.031	27.156	27.461
Persentase Koperasi Aktif	87,93	87,98	88,09

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Persentase koperasi aktif di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir (2013-2015) mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 persentase koperasi aktifnya sebesar 87,93 persen, meningkat pada tahun 2014 menjadi 87,98 persen dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 88,09 persen dengan rincian dari jumlah total 31.171 unit terdapat 27.461 unit koperasi yang aktif.

## 8.2. Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dimaksudkan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Dengan semakin bertambahnya minat serta kemampuan untuk berwirausaha dan daya saing koperasi dan UMKM, maka diharapkan mampu menjadi penggerak roda perekonomian berbasis kemasyarakatan di Jawa Timur.

**Tabel**  
**Pertumbuhan Wirausaha Baru di Jawa Timur**

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	4	4	10

*Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur*

Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan program ini antara lain Fasilitasi pemberdayaan UMKM melalui Inkubator bisnis sebanyak 120 calon pelaku UMKM, kegiatan pelatihan ketrampilan UMKM sebanyak 5.355 calon pelaku UMKM, sehingga pada akhir Tahun 2013 telah dilakukan penumbuhan jiwa kewirausahaan sebanyak 12.195 calon pelaku UMKM. Diproyeksikan bahwa sekitar 5% dari jumlah calon pelaku UMKM yang telah ditumbuhkembangkan jiwa kewirausahaannya sehingga menjadi wirausaha baru maka di Tahun 2014 diproksikan jumlah Wirausaha baru sekitar 635 UMKM dan pada Tahun 2013 diproksikan jumlah Wirausaha baru sekitar 610 UMKM. Sehingga pertumbuhan wirausaha baru pada Tahun 2014 adalah 4 % didapat dari penambahan WUB di tahun 2014 sebesar 35 WUB dibagi jumlah WUB tahun 2013. Pada tahun 2015, jumlah wirausaha baru bertumbuh 10% dengan capaian selama kurun waktu tersebut sebesar 111,1%.

### **8.3. Rasio Perputaran Modal Kopwan**

Program pembentukan Koperasi Wanita (Kopwan) dimulai sejak tahun 2009 dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan dan kredit usaha dengan memberikan modal awal sebesar Rp. 25 juta per kelompok wanita di setiap desa/kelurahan. Sampai dengan tahun 2010 sudah terbentuk 8.506 Kopwan disetiap Desa/Kelurahan. Selanjutnya tahun 2011-2014, diberikan bantuan perkuatan permodalan kembali untuk koperasi yang berkinerja baik.

**Tabel**  
**Rasio Perputaran Modal Kopwan**

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Rasio Perputaran Modal Kopwan	1,36	1,39	2,1

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

KSP/Usaha Simpan Pinjam Koperasi Wanita penerima bantuan hibah APBD Provinsi Jawa Timur sebanyak 8.506 Unit, 35.083 orang pengelola koperasi dan 501.639 orang anggota koperasi. Sampai dengan tahun 2015 modal sendiri mencapai Rp. 578.200.233.000,-, sedangkan modal luar sebesar Rp. 103.746.208.000,-, total Asset sebesar Rp. 682.221.441.000,- dan volume pinjaman sebesar Rp. 772.833.446.000,-, sehingga Perputaran modal sebesar 2,1 kali, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 1,36 dan 1,39.

## 9. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

### 9.1. Pertumbuhan ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketersediaan sumberdaya alam, kualitas sumber daya manusia, perubahan teknologi, kewirausahaan dan kecukupan modal. Sedangkan faktor eksternal diantaranya dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, tariff dasar listrik, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI Rate), kebijakan pemerintah pusat tentang penetapan besaran pajak dan perkembangan situasi perekonomian global.

**Tabel**  
**Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Ekonomi	6,08	5,86	5,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama tahun 2013-2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dasar tahun 2010 masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan melambatnya ekonomi global yang berdampak terhadap hampir seluruh

dunia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih bertahan pada level pertumbuhan 6,08 persen pada tahun 2013, melambat pada tahun 2014 menjadi 5,86 persen dan pada tahun 2015 menjadi 5,44 persen.

## 9.2. Predikat Opini BPK

Provinsi Jawa Timur memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel  
Predikat Opini BPK**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Predikat Opini BPK	WTP	WDP	-

Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selanjutnya pada tahun 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini dikarenakan masih ditemukan kelemahan yang harus diperbaiki sehingga tidak ada lagi temuan yang masih berulang pada Temuan Sistem Pengendalian Intern serta Temuan Kepatuhan Perundangan – Undang dalam pengelolaan keuangan di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk opini BPK Tahun 2015 belum dapat disampaikan karena masih dalam proses pemeriksaan sampai dengan bulan Mei tahun 2016. Sebagaimana pada tahun sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK juga disampaikan di hadapan DPRD Provinsi Jawa Timur pada bulan Juni.

Dengan pencapaian ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD

yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

## b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

### 1. Pertanian

#### 1.1. Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

**Tabel**  
**Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan	1,38	2,98	3,39

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dari data PDRB tiga tahun terakhir, pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan (tanaman pangan) mengalami pertumbuhan yang cukup baik atau meningkat tiap tahun. Pada tahun 2013 tercatat mengalami pertumbuhan 1,38 persen, dan selanjutnya tumbuh sebesar 2,98 persen pada tahun 2014, dan mencapai 3,39 persen di tahun 2015.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selalu berupaya agar sub sektor tanaman

bahan makanan ini bisa tumbuh semakin cepat tidak kalah dengan sub sektor lainnya.

### 1.2. Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

**Tabel**  
**Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Sub Sektor Tanaman Perkebunan	1,81	4,97	1,61

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Pada tahun 2013 sub sektor tanaman perkebunan tercatat sebesar 1,81 persen, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 4,97 persen dan pada tahun 2015 kembali menurun menjadi 1,61 persen.

### 1.3. Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan

adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

**Tabel**  
**Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Sub Sektor Peternakan	1,07	1,15	2,01

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Meskipun pertumbuhan sub sektor peternakan di bawah 3 persen, namun pertumbuhan selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 sub sektor peternakan hanya mampu tumbuh 1,05 persen dan kemudian merangkak naik tipis menjadi 1,15 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 sub sektor ini kembali mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya mencapai 2,01 persen.

## 2. Kehutanan

### 2.1. Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicapuk juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

**Tabel**  
**Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Sub Sektor Kehutanan	6,54	0,12	4,43

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Berbeda dengan sub sektor lainnya, sub sektor kehutanan tumbuh tinggi pada tahun 2013 sebesar 6,54 persen. Pada tahun 2014 melambat cukup drastis dan hanya mampu tumbuh 0,12 persen. Pada tahun 2015 sub sektor kehutanan kembali tumbuh cukup baik sebesar 4,43 persen.

## 2.2. Rehabilitasi Kawasan Hutan (ha)

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Rehabilitasi hutan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Pada tahun 2013 rehabilitasi kawasan hutan di Jawa Timur mencapai 14.637 ha, kemudian meningkat menjadi 24.675,5 ha pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi 24.660,4 Ha. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui kegiatan Penghijauan, Reboisasi, Pemeliharaan, Pengayaan tanaman, atau Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

**Tabel**  
**Rehabilitasi Kawasan Hutan Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Rehabilitasi Kawasan Hutan (Ha)	14.637	24.675,5	24.660,4

*Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur*



### 2.3. Rehabilitasi lahan kritis (lokasi)

Lahan kritis adalah lahan yang sangat tandus dan gundul dengan tingkat kesuburan yang sangat rendah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Lahan ini masih dapat dikelola walaupun produktivitasnya rendah. Bahkan dapat terjadi jumlah produksi yang diterima jauh lebih sedikit daripada biaya pengelolaannya. Jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, lahan tersebut akan menjadi padang pasir dan bukit-bukit batu atau cadas. Kegiatan rehabilitasi lahan pada lahan kritis merupakan salah satu upaya peningkatan sumber daya alam yang ada untuk dapat dikembangkan dan dilestarikan.

**Tabel**  
**Rehabilitasi Kawasan Hutan Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Rehabilitasi Lahan Kritis (Lokasi)	5	5	5

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Dalam upaya penanganan lahan kritis telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya pembinaan Menuju Provinsi Hijau (MPH) dan pelaksanaan demplot di 5 lokasi dengan total luas lahan yang terrehabilitasi sekitar 15 Ha. Jenis tanaman yang digunakan antara lain : cengkeh, apokat, durian dan polo. Demplot Menuju Provinsi Hijau ( MPH ) Berbasis Masyarakat Tahun 2015 dilaksanakan di :

- Desa Panduman, Kec. Jelbuk, Kab. Jember
- Dsn. Dawuhan, Ds. Sucolor, Kec. Maesan, Kab Bondowoso
- Desa Sumber Bening, Kec. Dongko, Kab Trenggalek
- Desa Joho, Kec. Semen, Kab. Kediri ( MPH )
- Desa Segawe, Kec. Pager Wojo, Kab Tulungagung

#### 2.4. Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (ha)

Reboisasi adalah Tindakan penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat di tebang atau akibat bencana alam, reboisasi memiliki tujuan yang sangat mulya untuk peningkatan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya alam. Dengan kembalinya fungsi hutan maka dapat menghindarkan lingkungan dari polusi udara, kembalinya ekosistem hutan, penyerapan karbondioksida yang optimal dan hasil hutan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Reboisasi sangat erat kaitannya dengan kata penghijauan, dengan menggalakkan penghijauan maka lingkungan sekitar tempat tinggal akan menjadi sejuk, ketersediaan air tanah akan terjamin dan meningkatnya kesuburan tanah. selain itu Reboisasi juga menurunkan fenomena Global Warming.

**Tabel**  
**Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (Ha)**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (Ha)	350	315	650

*Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur*

Reboisasi Taman Hutan Raya R. Soerjo dilakukan melalui penanaman dengan jenis tanaman endemik maupun bukan endemik seperti Cemara Gunung dan Akasia. Tahun 2015, luas kawasan Tahura R. Soerjo yang direboisasi lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut sebagai dampak adanya El Nino yang berkepanjangan di Tahun 2014 yang menyebabkan kawasan Tahura R. Soerjo mengalami kebakaran yang cukup luas dibanding tahun-tahun sebelumnya.

#### 2.5. Penurunan Luas kebakaran hutan (ha)

Kebakaran Hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga berakibat timbulnya kerugian ekosistem dan terancamnya kelestarian lingkungan. Upaya pencegahan Kebakaran Hutan merupakan suatu usaha Perlindungan Hutan agar kebakaran hutan yang berdampak negatif tidak meluas. Kebakaran hutan yang terjadi adalah akibat ulah manusia maupun faktor alam.

**Tabel**  
**Penurunan Luas kebakaran hutan (ha)**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Penurunan Luas kebakaran hutan (ha)	1.353,97	10.876,7	1.950

*Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur*

Gangguan hutan yang umumnya terjadi karena faktor alam adalah kebakaran hutan. Pada Tahun 2014 terjadi kebakaran hutan yang cukup luas khususnya di dalam hutan yang disebabkan oleh EL Nino seluas 10.876,7 Ha. Namun demikian, pada Tahun 2015 luas kebakaran hutan dapat ditekan menjadi 1.950 Ha. Hal tersebut disebabkan adanyaantisipasi dari kejadian sebelumnya, sehingga pada Tahun 2015 dirasa perlu melibatkan semua pihak baik masyarakat, pengelola kawasan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, kejadian kebakaran hutan dapat diminimalisir.

### 3. Energi dan Sumber Daya Mineral

#### 3.1. Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu : pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

**Tabel**  
**Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB	1,31	3,11	7,92

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Kinerja sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Tercatat pertumbuhan pada tahun 2013 hanya mencapai 1,31 persen, meningkat pada tahun 2014 sebesar 3,11 persen. Pada tahun 2015 sektor pertambangan dan penggalian kembali tumbuh cepat lebih dari dua kali tahun sebelumnya atau sebesar 7,92 persen.

### 3.2. Pertambangan Tanpa Ijin/ PETI (ha)

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang. Disamping itu, PETI bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.

**Tabel**  
**Pertambangan Tanpa Ijin/ PETI di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertambangan Tanpa Ijin/ PETI (Ha)	1.164,48	985,65	974,15

*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur*

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan menjadikan adanya penurunan jumlah luas PETI dari tahun 2013 sebesar 1.164,48 Ha menjadi 974, 15 Ha pada tahun 2015. Namun adanya pertumbuhan kegiatan pembangunan yang menuntut penyediaan bahan tambang (batuan) menyebabkan sulitnya untuk melakukan penertiban pertambangan tanpa izin di Jawa Timur.

### 3.3. Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin/PETI (Kab/Kota)

Pertambangan tanpa ijin atau yang dikenal dengan sebutan PETI merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pertambangan. Hal ini menimbulkan kerugian negara, terlebih permasalahan lingkungan yang ditimbulkan karena PETI karakteristiknya tidak mematuhi good mining practice sehingga menimbulkan eksekse seperti pencemaran lingkungan, pencemaran air dengan merkuri, tidak dilakukan reklamasi setelah pasca tambang dan sebagainya.

**Tabel**  
**Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin/PETI di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin/PETI	237,83	245,28	474,97

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

Pengurangan PETI dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertambah, yaitu dari 237,83 Ha pada tahun 2013 meningkat menjadi 474,97 Ha pada tahun 2015, hal ini diakibat oleh adanya peningkatan kesadaran masyarakat, penertiban yang dilakukan oleh kabupaten / kota dan adanya program percepatan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

#### 4. Pariwisata

##### 4.1. Pertumbuhan Sub Sektor Hotel terhadap PDRB

Pertumbuhan berbagai sektor di Jawa Timur juga diikuti dengan pertumbuhan di sektor Jasa akomodasi, sektor ini merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Jawa Timur. Yang dimaksud jasa akomodasi adalah hotel, dimana terbagi menjadi Hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya.

**Tabel**  
**Pertumbuhan Sub Sektor Hotel terhadap PDRB di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Sub Sektor Hotel terhadap PDRB	9,10	8,12	8,10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi dari sub sektor hotel atau pemberi akomodasi sebesar 9,10 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 pertumbuhan sub sektor hotel masih terjaga tinggi mencapai 8,12 persen. Kondisi ini tidak jauh beda dengan capaian tahun 2015 sebesar 8,10 persen.

Sub sektor hotel ini cukup menjanjikan. Beberapa tahun terakhir, pembangunan tempat-tempat akomodasi cukup marak di Jawa Timur. Di Surabaya sendiri, muncul hotel-hotel berbintang baru dengan menawarkan harga yang menarik bagi konsumen.

#### 4.2. Pertumbuhan Sub Sektor Restoran terhadap PDRB

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan perusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

**Tabel**  
**Pertumbuhan Sub Sektor Restoran terhadap PDRB di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Sub Sektor Restoran terhadap PDRB	5,25	8,21	8,10

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Seiring meningkatnya perkembangan ekonomi di Jawa Timur, sub sektor restoran juga berkembang cukup baik. Pada tahun 2013 sub sektor restoran tumbuh 5,25 persen dan selanjutnya tumbuh lebih cepat di tahun 2014 atau mencapai 8,21 persen. Pada tahun 2015 sub sektor ini mengalami perlambatan tipis atau mencapai 8,10 persen. Dari angka tiga tahun terakhir ini, dapat disimpulkan sub sektor restoran ini semakin berkembang dari tahun ke tahun mengikuti semakin berkembangnya kebutuhan makanan saji dalam masyarakat.

## 5. Kelautan dan Perikanan

### 5.1. Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah).

**Tabel**  
**Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	11,58	6,77	5,58

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dibandingkan sub sektor lainnya dalam kategori A, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan perikanan maka sub sektor perikanan dalam kontribusinya, tumbuh lebih tinggi. Bahkan pada tahun 2013 mencapai dua digit atau 11,58 persen.

Meskipun demikian, pada dua tahun terakhir yakni 2014 dan 2015 mengalami perlambatan atau masing-masing mencapai 6,77 persen dan 5,58 persen. Cuaca yang ekstrim dan tidak menentu, diduga menyebabkan perlambatan pertumbuhan pada sub sektor ini.

## 6. Perdagangan

### 6.1. Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Secara geografis Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis sebagai transit antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, sehingga tidak mengherankan jika lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB Jawa Timur. Lapangan usaha kategori ini merupakan salah satu tulang punggung utama perekonomian Jawa Timur.

**Tabel**  
**Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB	6,21	4,78	6,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Sektor unggulan Jawa Timur salah satunya adalah perdagangan. Menurut PDRB tahun dasar baru atau 2010, pertumbuhan sektor ini pada tahun 2013 mencapai 6,21 persen. Kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan seperti menguatnya mata uang dolar dan ketidakstabilan harga minyak dunia, berimbas pada pelemahan pertumbuhan pada tahun 2014 yang mencapai 4,78 persen. Beruntung pada tahun 2015 kinerja sektor ini kembali membaik dengan tumbuh 6,00 persen meski masih di bawah capaian 2013. Tingginya pertumbuhan sektor ini sangat dibutuhkan, karena terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi pertumbuhannya, semakin banyak tenaga kerja yang terserap.

## 7. Perindustrian

### 7.1. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Lapangan usaha kategori industri pengolahan memiliki peranan sangat strategis, disamping mampu menyerap tenaga kerja sangat besar, sektor ini dapat dilakukan ekspansi secara cepat. Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.

**Tabel**  
**Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	5,85	7,79	5,53

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



Sektor ini merupakan loko perekonomian Jawa Timur dan mempunyai kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Jawa Timur. Pada tahun 2013 sektor ini mampu tumbuh 5,85 persen dan kembali tumbuh dengan cepat pada tahun 2014 sebesar 7,79 persen. Pada tahun 2015 sektor ini sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya atau mencapai 5,53 persen. Pertumbuhan industri di Jatim terutama didukung oleh wilayah-wilayah industri yang tersebar di kabupaten kota sekitar Surabaya seperti Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Malang.

### III. ASPEK DAYA SAING DAERAH

#### a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.**

##### 1. Daya beli masyarakat/PPP (Rp.000)

Daya beli masyarakat atau PPP (*Purchasing Power Parity*) merupakan salah satu indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). kemampuan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi terutama kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan). Kemampuan memenuhi kebutuhan secara ekonomi tercermin dari indeks PPP (*Purchasing Power Parity*) atau indeks daya beli. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

**Tabel**  
**Daya beli masyarakat/PPP di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015**)
Daya beli masyarakat/ PPP	9.978,00	10.012,16	10.055,10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan: \*\*) angka sangat sementara

Daya beli yang ditunjukkan dari angka pengeluaran per kapita pertahun yang disesuaikan menunjukkan mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2013 mencapai Rp. 9.978,00 naik menjadi Rp. 10.012,16 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 kembali naik menjadi Rp. 10.055,10. Dengan kondisi tersebut, mengindikasikan kesejahteraan penduduk Jawa Timur mengalami perbaikan.

## 2. Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan (Rp.)

Kebutuhan manusia pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kebutuhan makanan dan non makanan. Kebutuhan manusia akan makanan tentunya ada batas-batas tertentu namun kebutuhan akan non makanan tidak ada batasnya.

Semakin tinggi tingkat pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan akan lebih kecil dibanding pengeluaran non makanan, dan sebaliknya kelompok masyarakat bawah pada kondisi ekonomi rendah, pengeluaran makanan akan selalu lebih tinggi dibanding pengeluaran non makanan.

Tabel berikut memberikan gambaran perkembangan kebutuhan/pengeluaran makanan penduduk Jatim mulai tahun 2013 sampai 2015. Dari tabel terlihat bahwa pengeluaran makanan penduduk Jatim semakin meningkat, begitu juga pengeluaran untuk non makanan. Kalau dibandingkan dari total pengeluaran tahun 2015 pengeluaran untuk makanan sebesar 45.88 persen sedangkan untuk non makanan sebesar 54.12 persen.

**Tabel**  
**Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan (Rp.)	296.362	333.945	380.993
Pengeluaran konsumsi Non.pangan per kapita per bulan (Rp.)	290.045	340.635	449.479
Total Pengeluaran konsumsi per kapita per bulan (Rp.)	586.407	674.580	830.472

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

## 3. Pertumbuhan Investasi (% Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB ADHB)

Salah satu indikator pertumbuhan investasi adalah PMTB. PMTB menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal yang dicatat dalam PMTB meliputi bangunan dan non bangunan. Pertumbuhan PMTB pada tahun 2014 mengalami sedikit perlambatan 4,37 persen dari 4,88 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2015,

PMTB mengalami percepatan menjadi 5,73 persen. Komponen bangunan pada tahun 2015 tumbuh 3,03 persen, sedangkan non bangunan tumbuh 4,71 persen.

**Tabel**  
**Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan PMTB terhadap PDRB (%)	4,88	4,37	5,37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

## b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 1. Lingkungan Hidup

#### 1.1. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Energi listrik telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan modern manusia, tanpa listrik aktivitas menjadi lumpuh. Hampir seluruh aspek kehidupan akan terpengaruh termasuk roda pemerintahan dan perekonomian secara khusus bisa terganggu bila tidak ada listrik, hampir seluruh aktivitas kehidupan modern sangat bergantung pada listrik. Menyadari hal tersebut, Pemerintah terus berupaya menyediakan pasokan listrik kepada masyarakat, bahkan Pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

**Tabel**  
**Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Rasio Ketersediaan Daya Listrik	80,51	83,60	86,68

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

PT PLN (Persero) yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam menyediakan listrik bagi masyarakat harus terus meningkatkan kapasitasnya agar mampu mengimbangi tingginya pertumbuhan permintaan listrik di Jawa Timur. Rasio elektrifikasi

didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada. Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada. Pada tahun 2013 rasio elektrifikasi mencapai 80,51, meningkat pada tahun 2014 menjadi 82,70 dan pada tahun 2015 menjadi 86,68. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir 87 persen kebutuhan listrik sudah dikonsumsi/dinikmati oleh pelanggan, baik rumahtangga, swasta, industri, instansi, lembaga perusahaan lainnya. Selebihnya sebesar 17 persen adalah ketersediaan listrik yang diusahakan sendiri (captive power) yang diusahakan untuk berbagai kepentingan baik swasta maupun masyarakat, termasuk yang masih dalam proses untuk bisa menikmati listrik bagi kehidupan sehari-hari.

### 1.2. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Saat ini ketersediaan energi listrik menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung aktivitas rumah tangga, baik untuk keperluan penerangan maupun mengakses berbagai kebutuhan lain. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi listrik kepada masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

**Tabel**  
**Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik	99,64	99,69	99,70

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga. Persentase rumah tangga berlistrik baik melalui PLN maupun Non PLN meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, yaitu dari 99,64 persen tahun 2013 menjadi 99,70 persen pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran daerah tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program Pengembangan Pemanfaatan Energi dan Kelistrikan dengan menyediakan sumber energi listrik dari energi terbarukan bagi masyarakat di daerah terpencil dan penyediaan listrik melalui bantuan sambungan rumah/instansi rumah bagi masyarakat kurang mampu di tempat-tempat yang telah ada jaringan distribusi listrik PLN.

### 1.3. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat urgent karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit cholera, typhus, disentri dan penyakit kulit. Rumah tangga yang memiliki akses air bersih di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 95,20. Jadi dalam hal ini pada tahun 2015 masih ada sekitar 5 persen rumah tangga yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih.

**Tabel**  
**Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	95,01	95,52	95,20

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

**c. Fokus Iklim Berinvestasi**

**1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

**1.1. Angka kriminalitas**

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

**Tabel**  
**Angka kriminalitas di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015**)
Angka kriminalitas	3,80	3,60	4,68

*Sumber : Polda Jawa Timur*

*Ket : \*\*) Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan data Polda Jatim, angka kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun per 10.000 penduduk. Dalam rentang tahun 2013-2015 angka kriminalitas cenderung mengalami penurunan yaitu dari 3,80 tahun 2013 menjadi 3,60 tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 angka kriminalitas menjadi 4,68 atau naik 1,08 poin dibandingkan tahun sebelumnya, ini berarti selama 1 tahun terakhir terjadi sedikit penurunan angka kriminalitas. Angka kriminalitas sebesar 4,68 menunjukkan bahwa terjadi hampir 5 tindak kriminal di antara 10.000 penduduk per tahunnya.

## 2. Pertanian

### 2.1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan factor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

**Tabel**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
NTP Jawa Timur	104,59	104,75	104,83
NTP Tanaman Pangan	103,25	99,57	100,34
NTP Hortikultura	102,77	104,87	103,85
NTP Perkebunan	104,73	103,72	101,28
NTP Peternakan	107,81	111,17	111,35
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,67	106,68	105,63
NTN	102,5	106,54	106,69

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

NTP Jawa Timur tahun 2015 naik sebesar 0,08 persen dibanding data tahun 2014 yaitu dari 104,75 menjadi 104,83. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani dibanding laju indeks harga yang dibayar petani. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2015 secara umum masih lebih baik dibanding kondisi tahun 2014.

Jika dilihat NTP masing-masing sub sektor pada tahun 2015, NTP tertinggi terjadi pada sub sektor peternakan sebesar 111,35 sedangkan NTP terendah terjadi pada sub sektor tanaman pangan

sebesar 100,34. Kenaikan NTP terjadi pada sub sektor tanaman pangan yaitu sebesar 0,77 persen dan sub sektor peternakan naik 0,16 persen. Sedangkan pada sub sektor tanaman hortikultura dan sub sektor perkebunan rakyat mengalami penurunan NTP. Meskipun demikian NTP pada kedua sub sektor tersebut masih terjaga di atas 100. Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2015 juga mengalami kenaikan tipis 0,08 persen dibanding tahun lalu atau mencapai 106,69.

**d. Fokus Sumber Daya manusia**

**1. Ketenagakerjaan**

**1.1. Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk berusia 15-64 tahun, dan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.

**Tabel**  
**Rasio Ketergantungan di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Rasio Ketergantungan	44,85	44,50	44,22

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Rasio ketergantungan atau Dependency ratio (DR) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



## 1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Pengertian lainnya adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya.

**Tabel**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,67	0,64	0,61

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan tiap tahun. Tahun 2013 jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 38,3 juta jiwa, meningkat hingga mencapai 38,8 juta jiwa pada tahun 2015. Sedangkan pertumbuhannya cenderung melambat, yaitu dari 0,67 persen pada tahun 2013 menjadi 0,61 persen tahun 2015.

## 1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Sedangkan pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

**Tabel**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,30	4,19	4,47

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2015 yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah Angkatan Kerja di Jawa Timur mencapai sebanyak 20,274 juta orang atau bertambah sebesar 124,69 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja tahun 2014 sebesar 20,149 juta orang. Dari angkatan kerja, yang terserap dalam lapangan kerja sekitar 95,53 persen atau 19,37 juta. Sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja (TPT) sebesar 4,47 persen atau 906,90 ribu orang pada tahun 2015, relatif meningkat dibandingkan kondisi tahun 2014 yang mencapai 4,19 persen atau 843,49 ribu orang.

#### 1.4. Indeks Pembangunan Gender

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

**Tabel**  
**Indeks Pembangunan Gender di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015**)
Indeks Pembangunan Gender	90,22	90,83	91,29

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

*Ket : \*\*) Angka Sangat Sementara*

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengkomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender), IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengkomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Angka Indeks pembangunan gender (IPG) di Jawa Timur menunjukkan perbaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2015 Indeks pembangunan gender (IPG) sebesar 91,29, kondisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar 90,22.

#### 1.5. Indeks Pemberdayaan Gender

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender, yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

**Tabel**  
**Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015**)
Indeks Pemberdayaan Gender	70,77	68,17	69,17

Sumber : BPPKB Provinsi Jawa Timur

Ket : \*\*) Angka Estimasi Sementara BPPKB Prov. Jatim

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan

sumbangan pendapatan. Dengan demikian, ara dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 70,77, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 68,17 dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 69,17.